

Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Tengah

Erika Yohana Simanjuntak¹, Larissa Kristina T.T. Situmorang², Alexandra Hukom³

1,2,3 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Palangka Raya

e-mail: rika27092002@gmail.com¹, larissa.situmorang006@gmail.com², mahasiswa.project2024@gmail.com³

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh APBD terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hubungan yang positif antara variabel APBD dengan variabel indikator kesejahteraan masyarakat, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Harapan Hidup (AHH). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: APBD, Kesejahteraan Masyarakat, Kalimantan Tengah, IPM, AKB, AHH.

Abstract

The Regional Budget (APBD) is an important instrument for local governments in carrying out their programs and activities to achieve development goals and community welfare. This study aims to analyze the effect of APBD on community welfare in Central Kalimantan. The data used in this study is secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the local government in Central Kalimantan. The analysis method used is multiple linear regression. The results of the study show that APBD has a significant positive effect on community welfare in Central Kalimantan. This is indicated by the existence of a positive relationship between the APBD variable and community welfare indicator variables, such as the Human Development Index (HDI), Infant Mortality Rate (IMR), and Life Expectancy Rate.

(LER). The findings of this study show that effective and efficient APBD management can improve community welfare in Central Kalimantan.

Keywords: APBD, Community Welfare, Central Kalimantan, HDI, IMR, LER.

PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Keberhasilan negara dalam pemenuhan cita-cita tersebut dapat dilihat dari pembangunan manusia yang berhasil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. IPM menggunakan tiga dimensi dasar dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia yaitu dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut diukur dengan cara yang berbeda-beda (Sulastrri and Efendri 2021) .

APBD Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah Triwulan IV 2023

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah Triwulan IV 2023 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah terhadap pagu dari 14 kabupaten/kota dan provinsi sampai dengan triwulan IV 2023 sebesar 97,96% atau secara nominal mencapai Rp26,29 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 dengan realisasi 100,34% terhadap pagu. Lebih rendahnya realisasi pendapatan pemerintah daerah terhadap pagu disebabkan oleh realisasi komponen Pendapatan Transfer yang lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan daerah sampai dengan triwulan IV 2023 adalah sebesar 16,24% (yoy), meningkat dibanding triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 3,61% (yoy) (Grafik 2.1)

Grafik 2.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah (Rp Miliar)



Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp4,343 triliun atau tumbuh 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2023 yang kontraksi 6,29% (yoy) (Tabel 2.1). Peningkatan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari komponen Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-Lain dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 12,24% (yoy) dan 9,54% (yoy). Pendapatan Pajak Daerah yang tumbuh positif sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak rokok sesuai dengan peningkatan tarif cukai rokok sebesar 10% pada tahun 2023. Selain itu, peningkatan pendapatan pajak daerah turut ditopang oleh peningkatan pendaftaran kendaraan bermotor pada tahun 2023 dari 83.909 kendaraan pada tahun 2022 menjadi 90.620 kendaraan.

Tabel 2.1 Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III 2022 dan 2023, dan Triwulan IV 2022 dan 2023 (Rp Miliar)

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	REALISASI TW III 2022 (RP. MILIAR)	REALISASI TW IV 2022 (RP. MILIAR)	REALISASI TW III 2023 (RP. MILIAR)	REALISASI TW IV 2023 (RP. MILIAR)	%YOY PERUBAHAN TW III 2023	%YOY PERUBAHAN TW IV 2023
PENDAPATAN	3.696	22.622,21	4.379,81	26.295,21	18,51%	16,24%
Pendapatan Asli Daerah	1.803,32	4.132,48	1.689,88	4.343,69	-6,29%	5,11%
Pajak	1.501,16	2.682,89	1.613,70	3.011,18	7,50%	12,24%
Retribusi Daerah	16,25	109,55	17,13	123,96	5,45%	13,15%
Hsl Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	90,41	243,84	1,34	7,79	-98,52%	-96,80%
Lain-lain Pad Yang Sah	195,50	1.096,19	57,70	1.200,75	-70,48%	9,54%
Pendapatan Transfer	1.884,08	18.360,28	2.681,12	21.879,09	42,30%	19,17%
Dana Bagi Hasil	511,98	3.408,12	1.271,52	5.720,59	148,36%	67,85%
Dana Alokasi Umum	1.184,13	5.748,45	1.168,56	7.186,97	-1,31%	25,02%
Dana Alokasi Khusus	168,01	2.274,75	219,04	2.073,89	30,37%	-8,83%
Dana Penyesuaian	18,01	111,21	19,31	150,58	7,24%	35,40%
Lain-lain	-	-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	8,25	129,45	8,82	72,42	6,82%	-44,05%
Hibah	8,10	71,27	6,72	41,17	-17,07%	-42,23%
Pendapatan Lainnya	0,16	57,78	2,10	31,25	1243,33%	-45,91%

Sumber : BKAD Kalteng, idbah

Pertumbuhan pendapatan transfer melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp21,879 triliun, meningkat sebesar 19,17% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 17,70% (yoy). Peningkatan disebabkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat signifikan pada triwulan IV 2023 sebesar 67,85% (yoy), didorong kinerja pertambangan dan industri pengolahan yang meningkat tajam akibat commodity boom atau kenaikan harga komoditas pada tahun 2022.

Pendapatan transfer merupakan komponen dengan pangsa terbesar dari pendapatan daerah

Yaitu sebesar 60,39%, disusul PAD dengan porsi 39,43% dari total pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan IV 2023 (Grafik 2.6). Pangsa pendapatan Asli Daerah meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 38,58%. Pendapatan Asli Daerah meningkat didorong oleh Pendapatan Lain-Lain yang tumbuh 9,54% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2023 yang terkontraksi 19,29% (yoy).

Pendapatan Pajak Daerah tercatat tumbuh 12,24% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,75% (yoy). Pendapatan Retribusi Daerah sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 13,15% (yoy) dari 13,81% (Sulaeman and Silvia 2019).

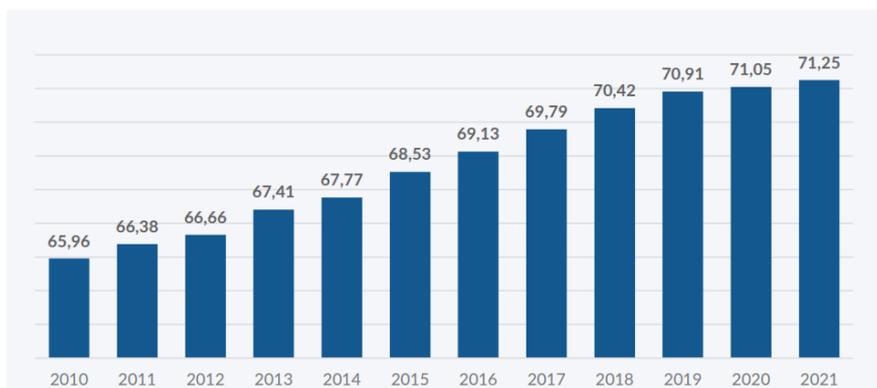
Di bawah ini merupakan IPM pada setiap provinsi di Kalimantan tengah tahun anggaran 2010-2021.

Perkembangan IPM Kalimantan Tengah Tahun 2010-2021

Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Kalimantan Tengah meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010-2021 IPM Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,70 persen per tahun, dari 65,96 pada tahun 2010 menjadi 71,25 pada tahun 2021. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kalimantan Tengah sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).

Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kalimantan Tengah Tahun 2010– 2021

Peningkatan IPM tahun 2021 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan). Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2010-2021 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1 berikut.



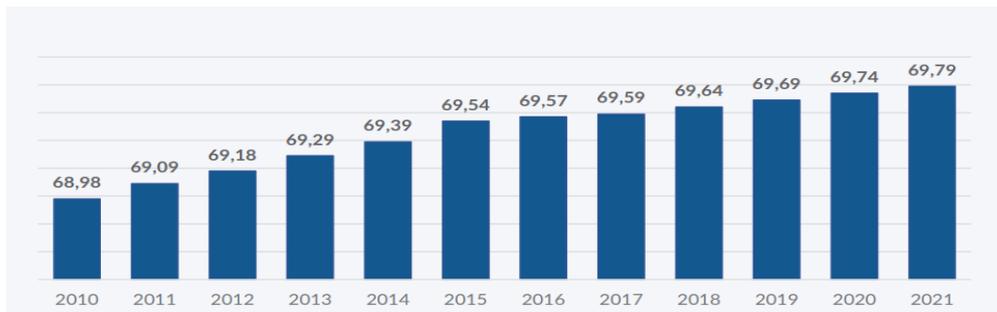
Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah, 2010-2021

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Menurut Dimensi Penyusunnya, 2010-2021

Dimensi/Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Umur Panjang dan Hidup Sehat													
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54	69,57	69,59	69,64	69,69	69,74	69,79
Pengetahuan													
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,09	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22	12,33	12,45	12,55	12,57	12,66	12,74
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51	8,59	8,64
Standar Hidup Layak													
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.257	9.472	9.557	9.641	9.682	9.809	10.155	10.492	10.931	11.236	11.154	11.182
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		65,96	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 0,81 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,11 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kalimantan Tengah adalah 68,98 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 69,79 tahun.

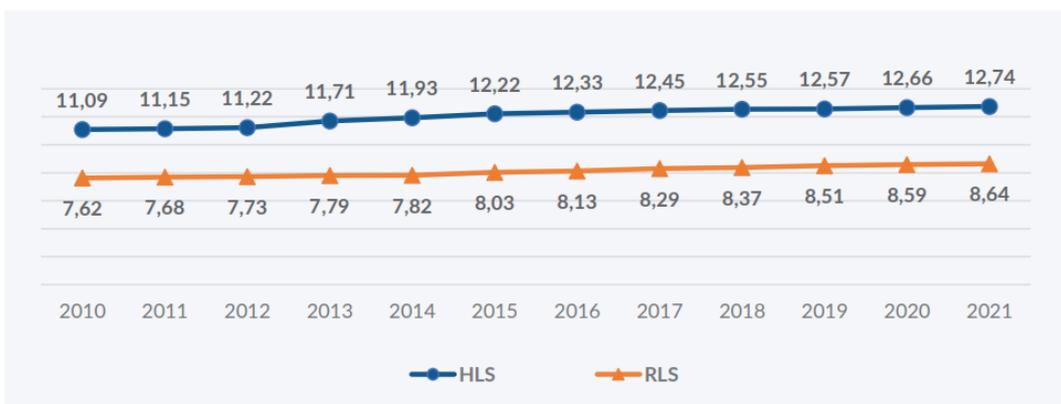


Gambar 2 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kalimantan Tengah, 2010-2021 (tahun)

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski selama pandemi COVID-19 mengalami perlambatan. Selama periode 2010 hingga 2021, HLS

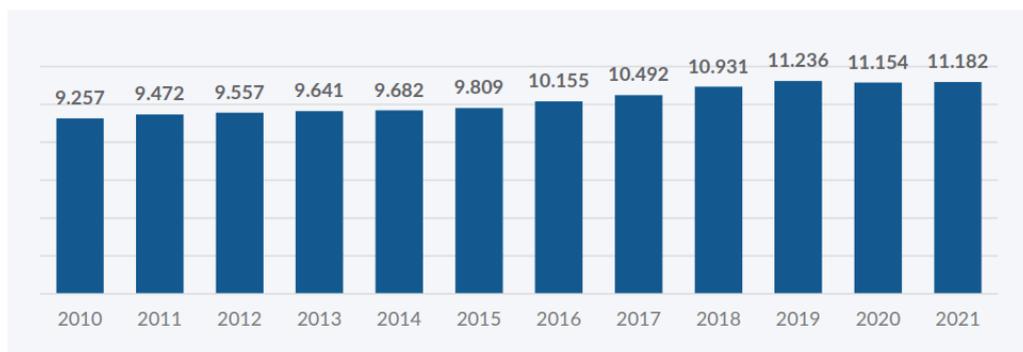
Kalimantan Tengah rata-rata meningkat 1,27 persen, sementara RLS rata-rata meningkat 1,15 persen per tahun.



Gambar 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kalimantan Tengah, 2010-2021 (tahun)

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Kalimantan Tengah mencapai 11,18 juta rupiah per tahun. Angka ini meningkat 0,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Kalimantan Tengah, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.



Gambar 4 Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2010-2021 (ribu rupiah)

Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Seiring dengan meningkatnya IPM Kalimantan Tengah pada tahun 2021, seluruh kabupaten/ kota di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan IPM. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM kabupaten/kota di Kalimantan Tengah sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan). Dari sisi perbandingan kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Seruyan (67,67), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palangka Raya (80,82) yang sekaligus menjadikan kota Palangka Raya sebagai satusatunya kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80). Jumlah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2021 sebanyak 7 kabupaten, dengan status “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) ada 6 kabupaten, dan dengan status “rendah” (IPM < 60) sudah tidak ada lagi (Badan Pusat Statistik 2021) .



Gambar 5 IPM Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021

Pembangunan nasional merupakan akar dari kesejahteraan masyarakat di dalamnya, khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya manusia. Maqin (2007) dan Fukuda (2009) dalam de Fretes (2017) menyatakan bahwa manusia merupakan akselerator pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam Hansen (2017) dalam UNDP (2019), akumulasi kemampuan, pengetahuan, dan inovasi di suatu negara merupakan aset terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan proyek besar yang dikemukakan oleh badan internasional, khususnya oleh United Nations Development Programme (UNDP) melalui program pembangunan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Dalam rangka mengukur keberhasilan masing-masing negara dengan

ragam ideologi dan kebijakannya dalam menjalankan tujuan bernegara secara ekonomi, terdapat indikator yang umum digunakan di antaranya (Siburian, Abdullah, and Firmansyah 2021).

Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam rangka membangun perekonomian daerah di wilayahnya, terdapat indikator pertumbuhan daerah yang didefinisikan dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran yang dialokasikan dalam APBD diharapkan mampu membiayai pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia. APBD memiliki postur pendapatan yang diperoleh secara mandiri melalui pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan yang diperoleh daerah dari daerahnya sendiri sesuai ketentuan perundang-undangan daerah yang berlaku. Sari dan Supadmi (2016) mengemukakan bahwa strategi alokasi belanja modal sebagai struktur belanja daerah dalam APBD tidak kalah penting dalam pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh peran legislatif daerah yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengesahan anggaran, khususnya dalam sektor yang memiliki pengaruh tinggi terhadap IPM seperti pendidikan dan kesehatan.

Desentralisasi fiskal memiliki awalan dari kebijakan transfer anggaran antar-pemerintah (intergovernmental transfer). Bentuk desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh Indonesia adalah dana perimbangan dan transfer. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejak penerapan awalnya pada tahun 2001, konsep dana perimbangan masih dipertahankan menjadi tiga komponen besar, yakni dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Tabel di bawah ini merupakan data pendapatan dari dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011—2018

Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan (dalam miliar Rupiah)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Barito Selatan	493,16	570,12	614,16	676,47	697,77	785,11	769,48	810,95
Barito Timur	422,63	488,30	546,57	609,55	624,55	690,79	609,13	673,69
Barito Utara	502,91	567,58	656,31	719,17	787,27	980,11	804,34	802,79
Gunung Mas	452,45	517,83	590,84	659,25	666,96	824,24	863,78	802,82
Kapuas	722,95	852,54	941,25	992,37	1.101,95	1.386,67	1.339,89	1.309,75
Katingan	583,08	608,76	665,06	793,80	852,82	918,85	920,15	1.007,01
Kotawaringin Barat	517,76	583,84	654,07	743,48	710,87	999,50	938,38	913,94
Kotawaringin Timur	664,51	737,15	876,67	933,85	968,52	1.203,68	1.101,88	1.133,63
Lamandau	393,60	441,55	492,97	539,87	668,88	762,93	602,81	617,03
Murung Raya	609,96	702,74	758,91	807,12	859,18	1.033,95	959,26	1.006,45
Pulang Pisau	429,39	488,25	548,81	584,37	718,77	844,58	747,35	820,75
Seruyan	548,65	621,02	724,73	739,67	690,20	865,98	863,83	886,36
Sukamara	354,89	396,80	471,68	508,13	594,08	667,20	569,19	584,78
Kota Palangka Raya	466,40	552,43	638,53	689,11	707,09	786,32	841,75	755,29

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020)

METODE

Penelitian ini bertujuan dalam rangka menguji beberapa variabel berupa PAD, dana perimbangan, dan ukuran perusahaan terhadap IPM menggunakan data pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah periode 2011—2018. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada tercakupnya semua komponen pendapatan daerah dan eksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan yang tidak langsung antara pendapatan dan IPM. Rentang waktu penelitian yang digunakan adalah setelah tahun 2010 yang bertepatan dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun semua pemerintah daerah paling lambat menerapkan SAP berbasis akrual di tahun 2015, pemerintah daerah mulai mempersiapkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta kesiapan perangkat pendukung. Pemilihan objek penelitian provinsi Kalimantan Tengah dilatarbelakangi oleh kurang tersedianya literatur yang cukup dalam meninjau dampak kebijakan fiskal pemerintah daerah di provinsi ini. Penelitian terkait dengan IPM di Provinsi Kalimantan Tengah masih banyak membahas dari dimensi kesejahteraan sosial dan indikator perekonomian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi Badan Kebijakan Fiskal, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan kebijakan desentralisasi fiskal agar lebih efektif dalam memberikan nilai tambah kepada pemerintah daerah. Bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan formulasi yang lebih komprehensif dan representatif, serta memberikan dorongan kepada pemerintah daerah bahwa dana perimbangan mampu memberikan nilai tambah yang tidak sebatas menjadi penutup biaya operasional, melainkan membantu meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pacuan agar lebih mengenali potensi sumber pendapatan daerah dan pendekatan efektif dalam meningkatkan investasi sumber daya manusia di daerah otonominya masing-masing melalui bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Schiavo-Campo (2017), pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi hak setiap warga negara yang tercantum dalam konstitusi masing-masing negara di wilayahnya. Sebagian besar kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sebagai tujuan bernegara membutuhkan pendanaan yang bersifat kolektif sehingga harus dikelola dengan suatu manajemen keuangan sektor publik. Pendanaan program tersebut menggunakan uang sebagai sumber daya yang langka dan memiliki lingkup yang luas atas kepemilikan dan kepentingan di dalamnya. Sebagai manifestasi kebijakan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, perlu disusun suatu penganggaran sebagai produk tata kelola dalam akuntansi kegiatan pemerintahan.

Adapun fungsi manajemen keuangan dalam manajemen keuangan sektor publik berdasarkan tingkatannya menurut Pamungkas (2013) adalah untuk

- a. mencapai disiplin fiskal yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan proses alokasi yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan; dan
- c. menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pemerintahan daerah.

Dari uraian di atas, dapat diberikan simpulan bahwa manajemen keuangan sektor publik merupakan tata kelola informasi dan sumber daya keuangan oleh entitas sektor

publik, khususnya pemerintah, dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk mencapai akuntabilitas kegiatan dan peningkatan mutu kebijakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pendapatan Asli Daerah PAD

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari empat bagian besar yaitu: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (BUMD atau Perusahaan Daerah), dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lainlain PAD yang sah bersumber dari (1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, (3) jasa giro, (3) pendapatan bunga, (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pengembangan Hipotesis

Mahmudi (2010) mengungkapkan bahwa peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota. PAD sebagai tolak ukur kemandirian daerah dinilai penting untuk pemerintah daerah dalam memahami segala potensi yang ada di dalam wilayahnya sebagai indikator kemandirian dalam perekonomian wilayah.

Dalam pengaruh PAD terhadap IPM, penelitian Lugastoro dan Ananda (2013), Prisilla (2018), dan de Fretes (2017) Rahmawati dan Fajar (2017), Kadafi (2014), Syukri dan Hinaya (2019)

- H1: PAD berpengaruh positif terhadap IPM
- H2: DBH berpengaruh negatif terhadap IPM
- H3: DAU berpengaruh negatif terhadap IPM
- H4: DAK berpengaruh positif terhadap IPM
- H5: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IPM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan terhadap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011—2018. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling sebagai metode pengambilan nonprobabilistik dan subjektif berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diolah sebagai sampel dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Objek penelitian menyampaikan laporan realisasi anggaran per tanggal pelaporan akhir tahun kalender periode anggaran 2011—2018 dan mempublikasikannya secara daring.
- Objek penelitian memiliki nilai IPM dan pengukuran indeks lain yang dibutuhkan secara lengkap didokumentasi selama 2011—2018.

- Informasi yang dimiliki kabupaten/kota memiliki data yang cukup dan memadai dalam menyediakan informasi PAD, DBH, DAU, DAK, total aset daerah, dan IPM. Populasi yang menjadi lingkup penelitian adalah 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terdaftar pada Tabel di bawah ini

Daftar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	
Barito Selatan	Kotawaringin Timur
Barito Timur	Murung Raya
Barito Utara	Lamandau
Gunung Mas	Pulang Pisau
Kapuas	Seruyan
Katingan	Sukamara
Kotawaringin Barat	Kota Palangka Raya

PAD adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011—2018. Variabel ini dinyatakan dalam nilai rasio.

$$X_1 = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil dalam penelitian ini adalah realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011—2018. Variabel ini dinyatakan dalam nilai rasio

$$X_2 = \frac{\text{Realisasi Dana Bagi Hasil}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dalam penelitian ini adalah realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011—2018, diukur dalam satuan milyar rupiah.

$$X_3 = \frac{\text{Realisasi Dana Alokasi Umum}}{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}$$

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam

APBN. Variabel DAK dalam penelitian ini adalah realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011—2018. Variabel ini diukur dalam nilai rasio.

$$X_4 = \frac{\text{Realisasi Dana Alokasi Khusus}}{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}$$

Ukuran Pemerintah Daerah diproksikan berdasarkan total aset pemerintah daerah. Variabel ini menggunakan proksi logaritma natural dari total aset pemerintah daerah

$$X_5 = \ln(\text{Total Aset})$$

Menurut BPS (2018), PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Jika PDRB dibagi jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, dihasilkan PDRB per kapita atas dasar harga pasar.

$$X_6 = \text{PDRB per kapita dalam juta} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times \frac{1}{1.000.000}$$

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2017). Kategori pengangguran terbuka meliputi mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

$$X_7 = \text{TPT} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}}$$

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS (2017), garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

$$X_8 = \text{MISK} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu: indeks angka harapan hidup ketika lahir, indeks pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani), angka melek huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau

lebih, dan indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita (purchasing power parity/paritas daya beli dalam rupiah)

$$Y = IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Model utama penelitian digunakan untuk mencari hubungan antara kualitas indeks pembangunan manusia dengan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan ukuran pemerintah daerah. Persamaan regresi berganda yang diterapkan dalam model ini memenuhi persamaan.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + e$$

Yang diketahui sebagai berikut.

Y = indeks pembangunan manusia

b0 = konstanta

bn = koefisien variabel-variabel independen, k = 1,2,...,8

X1 = rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan

X2 = rasio dana bagi hasil terhadap belanja modal

X3 = rasio dana alokasi umum terhadap belanja modal

X4 = rasio dana alokasi khusus terhadap belanja modal

X5 = logaritma natural dari ukuran pemerintah

X6 = PDRB per kapita dalam juta rupiah

X7 = tingkat pengangguran terbuka

X8 = tingkat kemiskinan

e = nilai galat model (residual)

Pemilihan sampel dilakukan dengan mengeliminasi satu entitas yang secara ringkas disajikan melalui tabel di bawah ini.

Pemilihan Sampel Penelitian		
Gambaran umum sampel penelitian	Total	Ukuran
Populasi	14	Pemerintah kabupaten/kota
Pengurangan jumlah sampel karena teridentifikasi merupakan pencilan (Kota Palangka Raya)	(1)	Pemerintah kabupaten/kota
Jumlah sampel	13	Pemerintah kabupaten/kota
Tahun	8	Tahun
Jumlah observasi	104	Pemerintah kabupaten/kota x Tahun

Sumber: data diolah

Hasil statistik deskriptif yang menggambarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini tersaji dalam Tabel dibawah ini :

Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Rata-rata	St. deviasi	Minimum	Maksimum
IPM (Y)	67,1174	2,2430	62,1600	72,4600
PAD (X1)	0,0577	0,0333	0,0247	0,1880
DBH (X2)	0,1447	0,0564	0,0589	0,3302
DAU (X3)	0,6302	0,0869	0,4617	0,8612
DAK (X4)	0,0991	0,0602	0,0000	0,2613
UKURAN (X5)	28,3959	0,3120	27,5214	28,8657
KPDRB (X6)	40,5987	11,3940	17,9457	70,9181
TPT (X7)	0,0331	0,0153	0,0031	0,0999
MISK (X8)	0,0581	0,0133	0,0301	0,0927

Sumber: data diolah

Selanjutnya, hasil analisis ini menggunakan uji regresi data panel dengan model efek tetap (FEM) untuk regresi linear berganda yang nilai konstanta dan koefisien beta diberikan berdasarkan Tabel di bawah ini.

Hasil Uji Regresi FEM

Variabel	Hipotesis	Koefisien beta	Galat standar	t	Prob > t	Sig.
PAD (X1)	+	4,980364	2,592504	1,92	0,029	**
DBH (X2)	-	-3,22136	1,916641	-1,68	0,048	**
DAU (X3)	-	0,400181	0,560785	0,71	0,760	
DAK (X4)	+	1,646857	1,135567	1,45	0,075	*
UKURAN (X5)	-	0,591478	0,342034	1,73	0,044	**
KPDRB (X6)		4,853275	0,495981	9,79	0,000	***
TPT (X7)		12,54415	3,581404	3,50	0,000	***
MISK (X8)		-31,2225	11,62111	-2,69	0,004	***
_cons		4,980364	2,592504	1,92	0,058	**
R-squared within		0,9293	F-statistic			136,34
R-squared between		0,0461	Prob F-stat			0,0000
R-squared overall		0,3513				

Sumber: Data diolah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara APBD dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi APBD suatu kabupaten/kota, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota tersebut.
- Pengaruh APBD terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah bervariasi antar kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
 - Efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD. Kabupaten/kota yang lebih efektif dan efisien dalam menggunakan APBDnya akan memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.
 - Kualitas infrastruktur. Kabupaten/kota yang memiliki infrastruktur yang lebih baik akan memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

- o Kualitas sumber daya manusia. Kabupaten/kota yang memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas akan memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021." *Berita Resmi Statistik* No. 87/11/(Th. XXIV, 15 November 2021):1–8.
- Siburian, Martin Tamaro, Muhammad Agrata Abdullah, and Amrie Firmansyah. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018." *Tirtayasa Ekonomika* 16(1):1. doi: 10.35448/jte.v16i1.111149.
- Sulaeman, Agus Sunarya, and Vivin Silvia. 2019. "Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 4(1):97–112. doi: 10.29303/jaa.v4i1.61.
- Sulastri, Evi, and Efendri. 2021. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kabupaten/Kota Di Seluruh Provinsi Di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019)." *Keywords in Qualitative Methods* 1–12.